

perundang-undangan, putusan yang saling bertolak belakang serta menyebabkan permasalahan hukum baru.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran baik untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, dan agar hasil penelitian ini dapat ditinjau lebih jauh lagi kedepannya, yakni: *Pertama*, diperlukannya parameter tertentu mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji norma yang sifatnya *delegated legislation*, untuk menghindari *overlay* kewenangan antara lembaga negara, baik antara lembaga peradilan dan lembaga pembentuk undang-undang. *Kedua*, diperlukannya pengaturan lebih lanjut untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal MA telah menjatuhkan putusannya, yang disusul dengan Putusan MK dengan objek perkara yang dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung. *Ketiga*, Integrasi kewenangan *udicial review* pada satu lembaga peradilan (MK) untuk menghindari terjadinya dualisme putusan peradilan dalam *judicial review*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Abdul Ghofar, Zaka Firma Aditya, "Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Masalah-Masalah dan Cara Penanggulangannya", Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 30 Juni 2023.

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Ctk. Pertama Gramedia, Jakarta, 1997.
- Ibnu Sina C, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2023.
- Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2020.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 1.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, 2006, hlm 108-109.
- Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Fatmawati, “*Hak Menguji Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Lita Tyesta ALW, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia*

- (*Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum*), Ctk Pertama, Pusaka Media, 2020.
- M. Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi*, ctk, kedua, Kencana, Jakarta 2022.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Depok, 2019.
- Moh. Mahfud MD, "*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, ctk. Kedua, PT Asdi Mahasaty, Jakarta, 2003.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi revisi, ctk 2., Rajawali Press, Jakarta 2017.
- Moh. Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 2.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk. Pertama, UII Press, 2005.
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk 3, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, 2013.

Victor Imanuel, *Konsep Uji Materiil : Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Ctk 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Zaka Firma Aditya “Kekuasaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak Warga Negara dalam Pemilihan Umum” dalam Pan M. Faiz, Anna Triningsih dan Achmad Edi S (editor) *Mahkota Mahkamah Konstitusi*, Ctk Pertama, Rajawali Press, Depok, 2019.

## **B. Jurnal**

Achmad, Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, Yustisia, Edisi Nomor 1, Vol. 2, 2013.

Agung Wiryasaputra, “Pengujian Open Legal Policy Melalui Judicial Review”, *Journal equitable*, Edisi No. 1, Vol 10, 2025.

Anfal Kurniawan, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol 5 Nomor 2, 2024.

Azhari S F, Eky Lestari, Tyara Fridayanti N, Ghaida Raisya A, “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu sosial*, Edisi no 3, Vol. 3, 2014.

Christine S.T Kansil, Sarah Angelina “Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme dan Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Edisi. 2, Vol 4, Universitas Tarumanegara, 2024.

Dian Sunardi, “Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Edisi no.2 Vol.16, UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

- Dio Siaga Putra, Anzorullah “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review terhadap Peraturan Perundang-undangan”, *Journal of Constitutional Law*, Edisi No. 1, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020.
- Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi. 5, Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2021.
- Fachrizza S P, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa Perpanjangan Paspor menjadi 10 Tahun” *Jurnal of Law and Border Protection*, edisi Nomor 1, Vol. 1, 2019.
- Fakhris Lutfiano Hapsoro, Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution” *Jambura Law Review*, edisi 2, vol. 2, 2020.
- Gunardi SA Lumbantoruan, “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)”, *Jurnal RechtVinding*, Edisi No 3, Vol. 9, 2020.
- Hardianto, Danang, “Hakim Konstitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, edisi 11, vol. 2, 2014.
- Ida Surya, Abdul Wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 8, 2024.
- Idul Rishan, “Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2024.
- Iwan Satriawan, Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, *jurnal Konstitusi*, Edisi No 3, Vol 16, 2019.
- Jayanti Puspitaningrum, “Perbandingan Judicial Review oleh Mahkamah Agung dan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Pasca Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Legal Pluralism*, Edisi no. 1, Vol.91, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No 4, Vol 3, 2006.

- M. Laica Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No 3, Vol. 1, 2004.
- Mangara M G, Ryan A, Rijali M D S, Wanda P D, “Juridical Analysis Related To Determining the Age Requirements Of Regional Head Candidates And Deputy Regional Head Candidates: Case Study Of Supreme Court Ruling Number Of 23P/HUM/2024” *Jurnal De Jure*, Edisi No. 2, Vol. 16, Universitas Balikpapan, 2024.
- Moh. Ali Hofi, “Judicial Review Satu Atap di Mahkamah Konstitusi sebagai Refleksi Terhadap Problematika dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Hukum HUKMY*, Edisi Nomor 2, Vol 1, 2021.
- Moh. Mahfud MD “Titik Singgung Wewenang antara MA dan MK”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi nomor 4, Vol. 1, 2015.
- Moh. Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Dasar 1945” *Jurnal Konstitusi*, Edisi No.1, Vol. 12, 2015.
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009- 2013”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi 2, Vol. 4, 2017.
- Nafiatul M, Maryam Nur H, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, edisi No. 2, Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi” , *Jurnal Konstitusi*, Edisi no. 1, Vol. 1, 2012.
- Radita Ajie “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, edisi no 2, Vol. 13, 2016.
- Safi”“Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan”, *Jurnal Rechtidee*, Edisi Nomor 2, Vol. 11, 2016.
- Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Edisi Nomor 3, Vol. 25, 2013.

Sri Wahyuni, “Demokrasi dan Negara Hukum dalam Islam”, Jurnal Review politik, Edisi no. 1, Vol 2, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Suhartini, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal de jure, Edisi. 1, Vol 11, 2019.

Syarif H A, Adithya Tri F, “Reflections on Sumpreme Court Decision Number 23P/HUM/2024: The Escalation of Political Judicialization and Judicial Politicization in Norm Testing”, Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Edisi No 1, Vol. 3, 2024.

Tanto Lailam “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Jurnal Media Hukum, Edisi No. 1, Vol. 21, 2014.

Tri Sulistyowati, “ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya”, Jurnal hukum Prioris, Vol 1, September 2006.

Winy S, Anisa D A, Aden Fadli M, “Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019”, Jurnal Jendela Hukum, Edisi No 1, Vol. 11, 2024.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Naskah Akademik UU No. 10 Tahun 2016.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

#### **D. Putusan Peradilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 23P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007.

#### **E. Data Elektronik**

[https://nursyamcentre.com/artikel/riset\\_agama/penerapan\\_demokrasi\\_dan\\_prinsipprinsip\\_islam](https://nursyamcentre.com/artikel/riset_agama/penerapan_demokrasi_dan_prinsipprinsip_islam) diakses pada 16 april 2025

<https://rumahpemilu.org/polemik-putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah/> diakses pada 30 april 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-perkara-puu-yang-dikabulkan-mk-sepanjang-2022-lt63b4fdab617b6/> diakses pada 7 januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menolak-konstitusionalisme-otoritarian-mempertahankan-demokrasi-konstitusional-lt5d775c64bc891?page=2> diakses pada 18 Maret 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2> diakses pada 7 Januari 2025.

<https://www.tempo.co/politik/alasan-baleg-dpr-ri-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-fraksi-pdip-satu-satunya-menolak-16920> diakses pada 8 Januari 2025.

<https://www.tempo.co/politik/jalan-keras-kawal-putusan-mk-hingga-gagalkan-dpr-sahkan-revisi-uu-pilkada-berikut-kronologinya-15410> diakses pada 9 Januari 2025.

#### **F. Sumber lain**

Eka Wahyu Sartika, “Penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (studi Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009)” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

Suparto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018), Edisi No. 1, Vol. 27, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.